

**ANALISIS PELAKSANAAN DINAS JAGA DI AHTS AMBER UNTUK
MENGHINDARI BAHAYA TUBRUKAN PADA SAAT BERLAYAR**

Muh. Fathir Muar¹, Hadi Setiawan², Indra Farman³

^{1,2,3} Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

1fathirtire@gmail.com, 2hdsetiawan@gmail.com,

3indrafarman@uim-makassar.ac.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of watchkeeping duty on AHTS AMBER in order to prevent the risk of collision during voyages. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through interviews with ship officers, direct field observation, and document review during sea practice on board. The findings show that watchkeeping practice has not been fully optimal according to STCW 1978 as amended in 2010, particularly regarding crew discipline in handing over the watch, coordination among watch personnel, and understanding of safety procedures. Navigational aids such as Radar and ARPA have also not been fully utilized to support collision avoidance, mainly because several officers were not yet familiar with the newer radar unit. These conditions are influenced by limited crew skill, insufficient understanding of standard operating procedures, and inadequate oversight from ship management. Improved training and familiarization, consistent enforcement of standard operating procedures, and better use of modern navigational equipment are recommended to increase vigilance and early hazard detection, so that the risk of collision can be minimized.

Keywords: watchkeeping, ship, maritime safety, optimization, collision

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan sistem dinas jaga pada AHTS AMBER dalam rangka mencegah timbulnya risiko tubrukan selama pelayaran. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan data dihimpun melalui wawancara bersama perwira kapal, pengamatan langsung selama praktik laut, serta penelaahan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dinas jaga di lapangan belum berjalan maksimal jika mengacu pada STCW 1978 Amandemen 2010, terutama menyangkut kedisiplinan serah terima jaga, koordinasi antaranggota jaga, serta pemahaman terhadap prosedur keselamatan. Penggunaan alat navigasi seperti Radar dan ARPA juga belum dimanfaatkan secara maksimal, karena sebagian perwira belum terbiasa dengan unit radar model terbaru. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan keterampilan awak kapal, kurangnya pemahaman terhadap SOP, serta belum optimalnya pengawasan manajemen kapal. Peningkatan pelatihan dan familiarisasi, penegakan SOP secara konsisten, serta optimalisasi penggunaan peralatan navigasi modern direkomendasikan guna meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi bahaya sejak dini, sehingga risiko tubrukan dapat diminimalisir.

Kata Kunci: dinas jaga, kapal, keselamatan pelayaran, optimalisasi, tubrukan

A. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan yang wilayah antarpulanya dihubungkan oleh laut dan selat, Indonesia menjadikan transportasi laut sebagai tumpuan utama distribusi barang lintas daerah. Kapal menjadi moda angkutan yang paling menentukan karena daya tampungnya besar dan biaya operasionalnya relatif hemat dibandingkan moda transportasi lain.

Ketentuan dinas jaga di atas kapal bersifat mengikat bagi seluruh kapal, termasuk bagi perwira yang diberi mandat menjalankan tugas jaga guna mencegah risiko tubrukan, sebab keberhasilan pelayaran hingga tiba selamat di pelabuhan tujuan sangat bergantung pada kapasitas dan efisiensi kerja personel di atas kapal.

Sejumlah insiden kecelakaan menjadi bukti nyata betapa krusialnya persoalan ini, salah satunya tenggelamnya kapal Bunga Melati 79 di Selat Wowoni, Sulawesi Tenggara, akibat tubrukan dengan tongkang yang sedang ditunda kapal lain. Peristiwa tersebut dipicu oleh kelemahan pengamatan dan koordinasi antarkapal saat berlayar pada malam hari di alur pelayaran yang padat. menyadari mendesaknya pemahaman yang

memadai seputar tata cara pelaksanaan dinas jaga guna mencegah bahaya tubrukan, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan belum terimplementasikannya STCW 1978 Amandemen 2010 secara baik dalam pelaksanaan dinas jaga di AHTS AMBER; dan (2) sejauh mana penggunaan peralatan navigasi di AHTS AMBER telah berjalan optimal dalam upaya mencegah bahaya tubrukan.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pelaksanaan dinas jaga di AHTS AMBER beserta tingkat penerapan ketentuan STCW 1978 Amandemen 2010, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan peralatan navigasi sebagai upaya pencegahan bahaya tubrukan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pemaparan dan penguraian pokok persoalan berlandaskan data yang dihimpun langsung dari lapangan selama penulis menjalani praktik laut di atas AHTS AMBER.

Data dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan

(observasi langsung terhadap pelaksanaan dinas jaga di anjungan serta kuesioner tertutup) dan penelitian pustaka (penelaahan literatur terkait dinas jaga, STCW 1978 Amandemen 2010, dan Collision Regulation 1972).

Analisis data menerapkan metode komparasi kualitatif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahap tersebut berlangsung secara siklikal, baik selama pengumpulan data maupun setelah seluruh data terhimpun, guna menghasilkan Kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Dinas Jaga di AHTS AMBER

Berdasarkan hasil observasi selama praktik laut, sistem pembagian dinas jaga di AHTS AMBER pada dasarnya telah disusun sesuai STCW 1978 Amandemen 2010, terlihat dari pembagian jam jaga 4-8 yang memberikan waktu istirahat sesuai ketentuan internasional (Tabel 1).

fc	Petugas Jaga	Keterangan
00.00-04.00	Second Officer, AB 1	Dinas Malam
04.00-08.00	Chief Officer, AB 2	Dinas Dini Hari
08.00-12.00	Third Officer, AB 3	Dinas Pagi
12.00-16.00	Second Officer, AB 1	Dinas Siang
16.00-20.00	Chief Officer, AB 2	Dinas Sore
20.00-00.00	Third Officer, AB 3	Dinas Malam

Tabel 1 Pengaturan Dinas Jaga di AHTS AMBER (1 spasi)

Namun demikian, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan keterlambatan pergantian dinas jaga oleh sebagian perwira, sehingga informasi mengenai posisi kapal, cuaca, dan lalu lintas pelayaran tidak selalu diterima secara lengkap oleh petugas jaga berikutnya. Wawancara dengan Muallim I menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut lebih dipengaruhi oleh rendahnya disiplin dan anggapan bahwa keterlambatan beberapa menit bukan pelanggaran serius, padahal hal ini dapat mengurangi kesinambungan pengamatan terhadap lalu lintas kapal. Selain itu ditemukan pula kelalaian perwira jaga dalam menyalakan radar saat cuaca buruk, ketidaklengkapan checklist navigasi cuaca buruk, pengabaian night order yang disusun nakhoda, serta minimnya perhatian terhadap berita cuaca NAVTEX. Faktor

penyebab belum optimalnya implementasi STCW 1978 Amandemen 2010 di antaranya adalah minimnya pemahaman crew terhadap isi STCW, ketiadaan buku pedoman di atas kapal, belum adanya sosialisasi dari kantor pusat, serta belum tersedianya aturan sanksi yang mengikat bagi perwira jaga yang terlambat.

2. Pengoptimalan Alat-Alat

Navigasi di AHTS AMBER

AHTS AMBER telah dilengkapi Radar & ARPA, Gyro Compass, serta sistem kemudi (otomatis, manual, dan darurat). Meskipun demikian, mualim seringkali tidak melakukan plotting posisi kapal lain yang terdeteksi radar meskipun radar telah dilengkapi ARPA, sehingga informasi penting seperti Closest Point of Approach (CPA) dan Time to Closest Point of Approach (TCPA) belum dimanfaatkan optimal untuk mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin. Salah satu unit radar model terbaru bahkan jarang dioperasikan karena sebagian mualim belum terbiasa dengan teknologinya.

Penerapan Collision Regulation 1972 pada situasi overtaking, head-on, dan crossing di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan

terhadap aturan sangat bergantung pada kemampuan perwira jaga melakukan pengamatan terus-menerus (look out), memanfaatkan radar dan ARPA, serta mengambil keputusan cepat sesuai prinsip good seamanship.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas jaga, beberapa aspek menunjukkan perbaikan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Aspek yang Diteliti	Kondisi Awal	Perbaikan
Pergantian jaga	Terlambat	Lebih disiplin
Radar	Tidak optimal	Digunakan maksimal
Night Order	Tidak dibaca	Wajib diperiksa
Look Out	Kurang optimal	Dilaksanakan terus-menerus

Tabel 2 Hasil Perbaikan Pelaksanaan

Dinas Jaga (1 spasi)

Berdasarkan temuan tersebut, rumusan masalah pertama terjawab melalui faktor rendahnya pemahaman awak kapal terhadap STCW, kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kedisiplinan sebagian perwira dalam pergantian jaga. Rumusan masalah kedua terjawab melalui temuan bahwa radar, ARPA, gyro compass, dan sistem kemudi telah tersedia namun pemanfaatannya belum maksimal karena keterbatasan keterampilan

operator.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan dinas jaga di AHTS AMBER belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai STCW 1978 Amandemen 2010. Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnya pemahaman awak kapal terhadap ketentuan STCW, rendahnya kedisiplinan perwira jaga, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan aturan oleh manajemen kapal.

Pemanfaatan alat-alat navigasi dalam mendukung pencegahan bahaya tubrukan juga belum maksimal, ditunjukkan oleh kurang optimalnya penggunaan radar dan ARPA, tidak konsistennya plotting target, serta rendahnya perhatian terhadap informasi cuaca NAVTEX. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pelatihan dan familiarisasi alat navigasi, penegakan SOP secara konsisten disertai sanksi yang tegas, serta optimalisasi penggunaan peralatan navigasi modern, khususnya pada kondisi cuaca buruk dan kepadatan lalu lintas pelayaran, agar risiko tubrukan dapat diminimalisir dan keselamatan pelayaran semakin terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, W. (2018). Optimalisasi peraturan pencegahan tubrukan di laut (P2TL) terhadap keselamatan pelayaran di MT. Patra Tanker 1 milik PT. Pertamina Trans Kontinental.
- Hasugian, S., Wahyuni, A. A. I. S., Rahmawati, M., & Arleiny, A. (2018). Pemetaan karakteristik kecelakaan kapal di perairan Indonesia berdasarkan investigasi KNKT. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 229-240.
- International Maritime Organization (IMO). (2011). *STCW including 2010 Manila Amendments: STCW Convention and STCW Code*. London: IMO Publishing.
- Kuncowati, & Listriyawati, N. A. (2020). Implikasi kemampuan berkomunikasi dan penggunaan kode isyarat internasional terhadap keselamatan pelayaran kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Jurnal Maritim*, 20, 147-159.
- Kurniawan, A., Purwantini, S., & Palapa, A. (2018). Analisis fix overtime untuk meningkatkan kinerja dinas jaga ABK kapal MT. Sepinggan di PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta. *Dinamika Bahari*, 9(1), 2151-2164.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Purwantomo, A. H. (2018). *Emergency procedure and SAR*. Semarang: PIP Semarang.
- Sara, G. J. V., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Penerapan International Regulations for Preventing Collisions at Sea terhadap penabrakan kapal TNI AL oleh kapal pengawas perikanan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 68-85.
- Tim Penyusun Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. (2024). *Pedoman penulisan skripsi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar*. Makassar: PIP Makassar.